



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EVI SYAEFUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN PEMERINTHAN, OTONOMI DAERAH DAH KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3. NHK : **265931**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	580.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/27 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	250.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, HONDA PCX 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	32.037.902
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	915.037.902
III. HUTANG	Rp.	6.642.862
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	908.395.040

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : GUSNEDI
- Jabatan** : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
- NHK** : 465866

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	7.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	9.500.000
III. HUTANG	Rp.	135.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-125.500.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : TUBAGUS RUBAL FAISAL
- Jabatan** : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
- NHK** : 464140

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.255.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.255.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	47.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	395.764
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.302.895.764
III. HUTANG	Rp.	155.535.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.147.360.764

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PURWADI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**
3. NHK : **92164**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.287.000.000**

1. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI
Rp. 77.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **215.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HIBAH TANPA AKTA Rp.
19.500.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
22.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **78.095.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **39.662.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **66.111.098**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.685.868.098
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.685.868.098

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : **DESSY SUSANTY**
- Jabatan** : **BENDAHARA**
- NHK** : **674274**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **736.500.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 736.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **87.000.000**

- MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **26.695.716**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **850.195.716**

III. HUTANG Rp. **18.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **832.195.716**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.